

IMF &

Jebakan Hutang Luar Negeri Negara Berkembang

Oleh: Bambang Nuroso, SE, MSi

Lima tahun setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2, Amerika Serikat mencoba membangun gagasan berskala internasional yang tujuannya adalah untuk menawarkan *Bretton Woods System*. Gagasan ini datang dari sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire. Pertemuan ini dihadiri oleh empatpuluhempat negara, yang ide awalnya adalah untuk menghindarkan dunia dari bencana ekonomi internasional sejak tahun 1930an, yang puncaknya dapat kita saksikan pasca Perang Dunia ke-2. Tiga pilar dari *Bretton Woods System* ini adalah IMF, di samping IBRD (*World Bank*) dan GATT. Tahun 1947, Amerika Serikat dan IMF telah mempersiapkan sebuah sistem keuangan internasional yang akan menggunakan basis "US\$" yang dijamin dengan "Gold", atau emas. Esensi dasar dan sangat penting dicatat dari kehadiran IMF ini adalah menciptakan "Stabilitas Nilai Tukar Valuta Dunia" di bawah pengawasan IMF, di samping fungsi-fungsi keuangan lainnya yang dimiliki. Tidak kalah penting adalah bahwa IMF juga dipersiapkan oleh Amerika Serikat dengan negara kapitalis lainnya sebagai filter basis kekuatan modal dunia yang mutlak dikendalikan oleh negara-negara non sosialis/komunis. Di sini nuansa ideologis/politis sangat transparan dan berpihak. Sangat jelas kiranya, kalau hendak menjalin hubungan dengan IMF apalagi yang berkaitan dengan bantuannya, maka harus steril dari ideologi sosialis/komunis.

Kasus Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno sulit meyakinkan lembaga seperti IMF ini, karena Soekarno dinilai condong berkiblat kepada blok sosialis/komunis. Penilaian ini adalah penilaian sepihak dan sangat subyektif, karena hanya didasarkan pada kepentingan dari negara-negara barat. Kesulitan Indonesia ini tidak pernah dilihat oleh negara-negara barat sebagai kesulitan bangsa/rakyat Indonesia, melainkan lebih dikarenakan perbedaan ideologi/politik.

Ekskalasi pertentangan ideologis/politis inilah yang kemudian menguatkan aliansi kekuatan politik di dalam negeri Indonesia dengan kekuatan-kekuatan luar untuk mengakhiri pemerintahan Soekarno dengan segala konsekuensinya. Munculnya pemerintahan Suharto yang direstui negara-negara barat sekaligus negara-negara yang tergabung di dalam IMF, memberikan angin segar bagi rezim Suharto, yang oleh negara barat disebut sebagai rezim anti komunis. IMF tidak hanya berkoalisi dengan rezim militer di Indonesia saja, tetapi banyak pemerintahan lain seperti Brazil, Kamboja, Myanmar, Argentina, Chili, Thailand di mana militer sangat berperanan. Fenomena ini sangat tampak ketika rezim masing-masing negara itu muncul memimpin rakyat dan negaranya, tidak kalah cepat, lembaga keuangan internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*) tampil di tengah-tengah pemerintahan hijau tersebut.

Kasus di Filipina, Kamboja, dan Srilangka di mana para kandidat Presiden/Perdana Menteri ketika berkampanye sebelum pemilihan umum, mendengungkan anti bantuan IMF. Beberapa bulan bahkan minggu setelah hasil pemilu diumumkan, para pemimpin yang sama yang kebetulan terpilih/memenangkan pemilu lupa dengan janji-janji kampanye sebelumnya, atau setuju dengan rayuan IMF dengan program-programnya. Kasus lain di negara-negara yang mewarisi garis komunisme Eropa Timur, seperti: Yugoslavia, Polandia, Bulgaria dan lain-lain, nyaris IMF tak dapat dibendung keberadaannya di tengah-tengah pembangunan ekonominya (sejak runtuhnya Uni Soviet/Komunis). Cina, Kamboja, Laos, Korea Utara yang secara tradisi juga ada di dalam garis sosialis/komunis ini menunjukkan kedekatannya dengan IMF, meski kontrol Amerika Serikat dan penyandang dana/modal yang lainnya masih tetap ada.

KEKUATAN POLITIK

Seperti diketahui bahwa IMF adalah bagaikan pemerintahan "Supra Nasional" yang paling eksis di dunia saat sekarang ini. Berbagai sumber yang berada di bawah kontrolnya, dan kemampuan untuk intervensi – masalah internal suatu negara penerima bantuan – memberi kepadanya (IMF), yang mana lembaga seperti PBB (UN) sendiri tidak bisa berbuat hal serupa. Kekuasaan IMF tidak semata berupa apa yang tercermin di dalamnya, seperti para ahli ekonominya, para Dewan Gubernurnya, tetapi IMF harus dilihat sebagai *Keystone*, dari keseluruhan sistem kekuatan politik negara-negara barat. Jangkauan kekuasaannya tidak hanya melihat besarnya sumber-sumber yang mereka (IMF) kontrol, seperti *International Credit Scheme*, "Penciptaan/Penjamin Stabilitas Kurs Valuta Dunia," "Lembaga Konsultasi – berbagai Lembaga Keuangan Dunia lainnya," seperti bank Dunia, Bank Central Eropa (ECB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan lain-lain. IMF telah jauh masuk ke sumber-sumber permasalahan internal setiap negara-negara penerima bantuannya. IMF banyak memiliki sumber-sumber informasi, baik itu politik, ekonomi, HAM, kebudayaan, lingkungan, maupun lainnya, yang semuanya sangat menjadi pertimbangan berbagai hal yang akan dikaitkan dengan skema bantuan yang akan diberikannya. IMF sekaligus memiliki kemampuan untuk membendung kekuatan-kekuatan yang hendak berseberangan dengan program-programnya. Indonesia sebagai contoh, ketika para arsitek ekonomi nasional ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk mematok "Kurs Tetap," antara rupiah dan dolar, dengan tangkasnya IMF tidak menyetujuinya. IMF juga telah jauh masuk ke permasalahan pergeseran asset nasional ke pihak asing. IMF dengan "LOI" nya banyak mendikte Indonesia, baik itu kala pemerintahan Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, maupun Megawati. Surutnya kepercayaan dunia kepada Indonesia merangsang IMF semakin jauh mencampuri otoritas keuangan Indonesia, apalagi sumber-sumber kebocoran/korupsi juga sedang mewabah di republik ini. Banyaknya partai politik di Indonesia adalah gejala baru sumber korupsi dan inefisiensi. Pemborosan tercipta di mana-mana tanpa disadari oleh para pemimpin nasional, yang setiap saat akan menciptakan krisis-krisis baru. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang menjadi pasien IMF semakin sulit untuk melepaskan tingkat ketergantungan mereka pada utang luar negeri. Semakin tergantung, semakin IMF eksis di depan pemerintahan negara-negara berkembang tersebut, dan gejala-gejala kekuatan supranasional tersebut semakin nyata.

Kasus utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya kurang lebih US\$150 milyar (sebelum *rescheduling*), atau kira-kira 130 quintillion/quadrillion (1300 trillion) rupiah, adalah beban dosa yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Generasi yang baru lahir dan tak berdosa harus menanggung dosa keturunan yang sulit dimaafkan. Semuanya ini, IMF tak peduli, meski usulan berbagai pihak agar dilakukan penghapusan, walau tidak seluruhnya. Sampai kepada masalah usulan *Hair Cut* untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) pun IMF

tidak setuju. Beban hutang itupun sulit untuk dikonversikan dengan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia, karena banyaknya kekayaan alam Indonesia yang dicuri oleh penjahat kerah putih, baik selama pemerintahan ORBA maupun hingga kini. Dalam hal kasus utang luar negeri (*Foreign Debts*) yang menjadi beban negara berkembang, termasuk Indonesia yang formulasinya lebih banyak dibuat oleh mereka (IMF), akhirnya menjebak kita sendiri ketika *Due Date* itu tiba. Sementara cadangan devisa yang dipersiapkan oleh pemerintah tidak seimbang dengan besaran kewajiban hutang yang harus dibayar. Atau, tabungan yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk membayar utang luar negeri yang harus dibayar dengan valuta asing. Devisa yang diharapkan dari hasil ekspor banyak terserap untuk impor barang modal dan kewajiban lainnya.

Intensifnya lembaga multilateral seperti IMF melihat setiap persoalan di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), lebih didorong oleh, pertama, banyaknya kelemahan / permasalahan struktural yang melanda pemerintahan negara berkembang. Dari awal IMF telah menjebak pemerintahan-pemerintahan tersebut, karena kurangnya perhatian IMF atas transfer manajemen keuangan modern yang seharusnya menjadi kewajiban IMF untuk memberikannya. Seperti ada unsur kesengajaan bahwa IMF telah memasang *Loophole*, dengan menggiring negara-negara berkembang memasukinya tetapi kemudian menutup kedua ujung katupnya. Menggiring untuk tunduk dengan berbagai LOI yang mereka (IMF) telah persiapkan, tanpa ada kesempatan untuk balik menggiring IMF memahami semua persoalan yang sedang membelit negara-negara berkembang. Jebakan ini telah menciptakan tingkat ketergantungan yang teramat berat ketika negara-negara berkembang harus menentukan berbagai pilihan yang settingnya telah ada dan tidak keluar dari kepentingan IMF. Kedua, IMF sebagai pemerintahan "Supranasional," mempunyai kepentingan-kepentingan jangka panjang yang bersifat permanen, dan lebih mewakili negara-negara kapitalis barat. IMF yang di situ juga terhimpun banyak negara sebagai anggotanya, akan tetapi kunci-kunci kebijakan/peranan penting untuk menentukan arah tujuannya yang bersifat permanen dan tersembunyi hanya bisa digelar oleh sekelompok kecil negara-negara industri modern/kapitalis. Tidak dapat dipungkiri, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Canada, Jepang, Australia, Jerman, Belanda, dan lain-lain, adalah negara-negara yang sangat kental dengan berbagai kepentingan IMF. Fakta sistem moneter dunia jelas-jelas telah membentangkan objektivitas bahwa lebih banyak keuntungan yang harus dinikmati oleh negara-negara kapitalis modern yang tergabung di dalam rumah besar dan kokoh yang namanya IMF, ketimbang yang dialami oleh negara berkembang yang kebetulan ada di dalam rumah yang sama. Benturan-benturan kepentingan semakin melebar dan satu sama lain semakin jauh dari iklim keadilan, karena tersembunyinya kepentingan yang bersifat permanen tadi. Semua dilihat dari konsep "Konservatisme" barat yang senantiasa membanggakan adanya kewajiban moral negara-negara barat sebagai "Dewa Penolong" di tengah krisis, kapan saja dan di belahan bumi mana saja.

Konservatisme barat ini kemudian menjadi beban nilai yang melekat di setiap program-program IMF yang tidak pernah pula keluar dari rel kapitalisme. Fakta ini harus diakui bahwa tidak satupun bentuk bantuan yang diintegrasikan melalui kebijakan IMF, akan keluar dari rel kapitalisme barat

JALAN KELUAR

Skala prioritas selayaknya ditempuh oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) di sini adalah: Pertama, negara-negara berkembang harus mampu merumuskan karakteristik lembaga seperti IMF ke depan. Menangkap gelagat dan sifat bantuannya, sekaligus mengkritisi dengan ujung kata menerima atau menolak. Jangan menciptakan akumulasi permasalahan baru sementara permasalahan lama belum terselesaikan. Kedua, perlunya merumuskan secara bersama-sama "Lembaga Sindikasi Keuangan," misalnya dilihat dari kepentingan regional. ASIA, misalnya, bisa dibentuk "AMI" (*Asian Monetary Funds*) yang bisa dijadikan lembaga sindikasi keuangan yang akan mampu mengimbangi kekuatan/kekuasaan IMF (yang selama ini banyak mewakili kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa. Ketiga, negara-negara berkembang yang selama ini masih banyak bergantung kepada IMF, sebaiknya segera menata kembali permasalahan internal yang selama ini banyak dijadikan dalih oleh IMF sebagai sasaran tembak, dan secara politis memposisikan negara-negara berkembang di posisi yang lemah. Keempat, perlu dikembangkan wacana *Integrated Currency*, yang bisa dilihat dari segi kepentingan regional. Misal, *Asean Currency*, *Middle East Currency*, *SINO Currency*, dan lain-lain, yang esensinya memotong hambatan sistem transaksi perdagangan yang selama ini banyak ditentukan dengan valuta US\$. Uji coba yang telah ditempuh Uni Eropa setidaknya mampu menyempitkan perbedaan, akibat selisih nilai kurs antara US\$ dan Euro. Keseimbangan semakin nyata, dan permasalahan yang menyangkut selisih kurs yang selama ini banyak menyulitkan di dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional dan lain-lain, dapat teratasi. Munculnya kekuatan-kekuatan regional nantinya diharapkan mampu menciptakan integrasi permodalan, mempermudah sistem transaksi-transaksi regional, dan menghindarkan dari praktek-praktek ketergantungan absolut dari sumber-sumber

keuangan barat. Kelima, konsistensi negara-negara berkembang untuk memerangi praktek-praktek ilegal di dalam birokrasinya selama ini, justru menjadi inti permasalahan. Banyak pemborosan negara diciptakan oleh sistem birokrasi yang buruk. Korupsi yang menjadi alasan klasik selama ini hidup subur bagaikan parasit negara yang sulit diberantas. Dari rezim ke rezim berikutnya, hantu korupsi menghadang, dan celakanya Indonesia pernah mendapatkan pujian terbaik korupsinya. Korupsi bukan menjadi monopoli Indonesia. Korupsi ada di mana-mana, di negara berkembang lainnya termasuk juga di negara-negara maju. Tetapi korupsi harus dikikis sampai sekecil-kecilnya, bahkan dibasmi. Logika yang membenarkan sistem keuangan internasional seperti IMF untuk senantiasa terus mencampuri permasalahan negara-negara berkembang, karena ia (IMF) melihat adanya celah-celah kelemahan, dan karenanya ia eksis sebagai *God Father*.

Bambang Nuroso

Staf Pengajar Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia

Staf Pengajar FISIP Universitas Nasional

Anggota Center for Economic and Institutional Studies (CEIS)

Bibliography

Albert, Michel, "Capitalism vs Capitalism." How America's obsession with individual achievement and short-term profit has led it to the brink of collapse. New York: Four Wall Eight Windows, 1993

Biersteker, Thomas J., "Dealing with Debt," International Financial Negotiation and Adjustment Bargaining, Westview Press, Inc., 5500 Boulder, Colorado 80301-2877, 1993

Batra, Ravi DR., "The Myth of Free Trade." A Plain for America's Economic Revival, Macmillan Publishing Company 866-Third Avenue, New York, NY 10022, 1993

Payer, Cheryl, "The Debt Trap," The International Monetary Fund and the Third World, Monthly Review Press, New York, London, Cheryl Payer, 1998

Smith, J.W., "The World's Wasted Wealth", The Political Economy of Waste, New Worlds Press, Kalispell, Montana, 1989

Americanist Logic ?

A little boy went to school for the first time and the teacher explained that if he want to go to urinate he should raise his two fingers. The boy, looking puzzled, asked: "How's that going to stop it?"



"Mama, can Willie stay for lunch?"